



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Jl. Kolonel Samsul Bahrhun Padang Kempas - Bintuhan 38563

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAUR
NOMOR: TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN KAUR

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur disusun untuk menyediakan alat ukur/hasil yang akan dicapai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur;
- b. Bahwa Alat Ukur Kinerja yang dimaksud berupa kuantitatif dan kualitatif tingkat capaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kaur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 309 Tahun 2025);
14. Peraturan Bupati Kaur Nomor 100 Tahun 2023 sebagaimana yang telah diubah ke dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 1345);
15. Peraturan Bupati Kaur Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025 Nomor 1450).

MEMUTUSKAN :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur menjadi tolak ukur kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Kaur

ISMAWAR HASDAN, ST, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19790816 200312 1 005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur.

Nomor : Tahun 2026

Tanggal : Januari 2026

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAUR**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | FORMULASI/RUMUS | METODOLOGI | SUMBER DATA |
|----|--|--|--|-----------------|--|---|--|
| | | | | % | | | |
| 1 | Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dan Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Meningkatnya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | 60,71 | $\frac{\text{Jumlah RT Berhunian Layak dan Terjangkau}}{\text{Total Jumlah Rumah Tangga}} \times 100 \%$ | Survey Lapangan dan Analisa Data Sekunder | Data Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kab.Kaur dan Data Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kab. Kaur |
| | | Meningkatnya Keadilan dalam penguasaan Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | 60 | $\frac{\text{Jumlah yang Teradministrasi}}{\text{Target Kebutuhan Tanah}} \times 100 \%$ | Survey Lapangan dan Analisa Data Sekunder | Data Bidang Pertanahan |
| | | Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni | 1 | $\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani}}{\text{Total Jumlah Rumah Korban Bencana yang Rusak}} \times 100 \%$ | Survey Lapangan dan Analisa Data Sekunder | Keputusan Bupati Kaur Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kab. Kaur |
| | | | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni | 10 | $\frac{\text{Jumlah Warga Terlokasi yang Memperoleh Fasilitas Rumah Layak Huni}}{\text{Total Jumlah Warga Terlokasi Akibat Program Provinsi}} \times 100 \%$ | Survey Lapangan dan Analisa Data Sekunder | Keputusan Bupati Kaur Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kab. Kaur |
| | | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Persentase Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani | 0,54 | $\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh < 10 Ha yang Ditangani}}{\text{Total Luas Kawasan Kumuh < 10 Ha yang Terdata}} \times 100 \%$ | Survey Lapangan dan Analisa Data Sekunder | Data Bidang Perumahan SK Kawasan Kumuh |
| | | | Berkurangnya Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | 67,11 | $\frac{\text{Jumlah Unit Perumahan dengan PSU Lengkap}}{\text{Total Unit Perumahan}} \times 100 \%$ | Survey Lapangan dan Analisa Data Sekunder | Data Bidang Perumahan |
| | | Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman. | Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 76 | $\frac{\text{Jumlah Perumahan dengan PSU}}{\text{Total Unit Perumahan}} \times 100 \%$ | Survey Lapangan dan Analisa Data Sekunder | Data Bidang Perumahan |
| | | Meningkatnya Penyediaan dan Penyelesaian Permasalahan | Jumlah Bidang Tanah yang di Redistribusi | 40 | $\frac{\text{Jumlah Bidang Tanah yang di Retribusi}}{\text{Jumlah Bidang Tanah yang di Mohonkan}} \times 100 \%$ | Survey Lapangan dan Analisa Data Sekunder | Data dari BPN tentang Objek Bidang Tanah yang Teredistribusi |
| | | Meningkatnya Tata Kelola dan Akunabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 70-73 | - | Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Hasil Penilaian Kinerja Sistem Digital Terintegritas Tahunan OPD |
| | | | Nilai SPIP Perangkat Daerah | 3 (Terdefinisi) | - | Hasil Nilai SPIP Perangkat Daerah | Hasil Penilaian Kinerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahunan OPD |

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur

Ismawar Hasdan, ST, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19790816 200312 1 005